



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 10, No. 1, 2024 (1-12)

PETER DONOVAN: NEUTRALITY IN RELIGIOUS STUDIES

Mutia Ainun Nabila

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mutiaanabilaa8@gmail.com

Abstract

Peter Donovan is an academic who writes about neutrality in the study of religion. Neutrality in the study of religion can be understood as an effort to understand the religion of others from a perspective of neutrality and to use the preferences of the individuals involved to attempt a reconstruction within and according to the experiences of those individuals. This article aims to provide an understanding related to the neutrality needed in the study of religion as well as its relevance in the field of religious politics. The method used in this research is library research. According to Donovan, there are three forms of neutrality in the study of religion, namely observer neutrality (researcher neutrality), participant neutrality (neutral participants), and role neutrality (neutral roles). Peter Donovan interprets neutrality in the study of religion as an effort to maintain an open-minded, unbound, objective, impartial, non-partisan, and independent perspective in studying religion. Neutrality is necessary so that scholars can understand and appreciate the diversity of religious traditions and avoid imposing their own beliefs or values on the subjects of their study.

Keywords: *Neutrality, Study of Religion, Politics*

Abstrak

Peter Donovan adalah seorang akademisi yang menulis tentang netralitas dalam studi agama. Netralitas dalam studi agama dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan netralitas yang dibutuhkan dalam studi agama maupun kaitannya dalam bidang politik keagamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni *library research*. Menurut Donovan Tiga bentuk netralitas dalam studi agama, yaitu netralitas pengamat (netralitas peneliti), netralitas partisipan (peserta yang netral), dan netralitas peran (peranan yang netral). Peter Donovan mengartikan netralitas dalam kajian agama sebagai upaya mempertahankan cara pandang yang terbuka, tidak terikat, obyektif, tidak memihak, non-partisan, dan independen dalam mempelajari agama. netralitas diperlukan agar para sarjana dapat memahami dan menghargai keragaman tradisi agama dan menghindari pemaksaan keyakinan atau nilai-nilai mereka sendiri pada subjek kajiannya.

Kata Kunci: *Netralitas, Studi Agama, Politik*

PENDAHULUAN

Netralitas dalam studi agama merujuk pada prinsip-prinsip utama penelitian ilmiah sosial seperti objektivitas dan netralitas untuk membuktikan kebenaran hasil dari generalisasi mereka. Dalam kajian agama, netralitas dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi menurut pengalaman orang lain tersebut.

Pikiran terbuka, terlepas, objektif, tidak tertarik, tidak memihak, tidak berpihak, dan mandiri adalah istilah yang biasanya digunakan ketika studi agama berupaya menampilkan dirinya sebagai disiplin akademis. Frasa seperti agnostisisme metodologis, penangguhan penilaian, dan netralitas prosedural juga ditemukan dalam upaya untuk merumuskan metodologi yang tepat. Jarang ada istilah frasa yang tepat ditentukan atau perbedaan di antara hal tersebut diperiksa. Namun refleksi sesaat mengungkapkan bahwa hal tersebut jauh dari jelas atau tidak ambigu, dan jika akan digunakan sama sekali secara efektif dalam konteks ini, akan lebih banyak pekerjaan harus dilakukan dengan cara analisis awal dan klarifikasi.

Objek dari studi agama adalah manusia yang beragama dengan berbagai manifestasi keberagamaannya. Posisi fenomena kehidupan manusia dengan berbagai kompleksitasnya yang menjadi objek material dari studi agama, merupakan posisi yang sama bagi manusia yang mempelajarinya. Artinya fenomena keberagaman manusia yang dikaji merupakan fenomena yang dialami dan dirasakan pula oleh manusia yang mengkajinya.¹ Hal ini menimbulkan sebuah pandangan bahwa secara metodologis studi agama merupakan ilmu yang tidak netral dan objektif. Para sarjana studi agama berupaya keras untuk membangun wacana mengenai netralitas dan objektivitas dalam kajian agama, salah satunya adalah Peter Donovan. Bagi Donovan, netralitas itu bisa dibangun dalam beberapa aspek diantaranya netralitas dalam konteks *observer* (pengkaji), *participant* (keterlibatan dengan objek), dan *role* (standar internal, code of conduct, dan prosedur yang berperan dalam seluruh proses kajian).

Epoche, mungkin satu kata itu yang bisa mewakili atas artikel yang berjudul *Neutrality in Religious Studies*. Satu kata yang memberikan pengertian bahwa di dalam meneliti agama, seorang observer harus bisa "menyimpan" dulu background keagamaan yang sedang ia peluk, tanpa ada kecenderungan, harus independen, terbuka, objektif, dan tidak memihak. Dengan kata lain membiarkan objek materialnya berbicara sebagaimana mestinya.

Ada tiga bentuk perbedaan netralitas menurut Peter Donovan. Pertama, *observer-neutrality* (netralitas peneliti). Seorang peneliti sebaiknya tidak memberikan penjelasan yang *overlap* tentang objeknya apalagi sampai dievaluasi. Jadi, peneliti adalah seorang yang tidak berhubungan apapun terhadap objeknya, kecuali hanya sebatas peneliti yang *just for knowledge*. Kedua, *participant-neutrality* (peserta yang netral), sebagai partisipan yang netral ini berguna agar seorang peneliti bisa menyesuaikan dan tidak mengubah materi yang sedang ditelitinya. Ketiga, *role-neutrality* (peranan yang netral), artinya di dalam melakukan riset harus mempunyai paradigma untuk mengembangkan keilmuan atau mengungkap fakta secara aktual, tanpa ada dorongan untuk memberikan komentar ataupun menilai objek dengan kaca mata tertentu.

¹ Ustadi Hamsah, "Signifikansi Analisis Elenktik Bagi Metode Studi Agama Di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)", *Esensia* vol 17, no 2, 2016, 180 175-192

Dari ketiga bentuk itulah yang kemudian mewajibkan seorang peneliti untuk sejenak melepaskan "kepercayaannya", agamanya, ras, tradisi, pemikiran, atau mencoba untuk menjadi seperti pemeluk agama yang sedang ditelitinya, agar ia benar-benar merasakan seperti apa yang dirasakan oleh pemeluk agama yang ditelitinya. Inilah yang kemudian disebut dengan *epoche*.

Untuk melakukan *epoche* seseorang harus menggunakan pendekatan fenomenologi ketika melakukan riset. dengan pendekatan ini suatu fenomena keagamaan akan berbicara apa adanya tanpa harus diintervensi oleh riset, sebab bila terjadi penilaian maka akan menimbulkan justifikasi. Oleh sebab itu di dalam menggunakan pendekatan ini peneliti harus menetralkan dirinya tentang metodologi. Dalam hal ini, tulisan ini akan memaparkan lebih lanjut dalam pembahasan berikut ini.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, salah satunya membutuhkan metode penelitian apa yang harus digunakan agar penelitian dapat terarah dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggambarkan netralitas dalam studi agama dan politik keagamaan. Artikel ini disusun berdasarkan data-data dan referensi yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Metode penulisan ini bersifat studi pustaka dan data yang sudah terkumpul disusun dan diurutkan secara logis dan sistematis. Kesimpulan diperoleh dari keseluruhan isi artikel yang berisi inti-inti yang disingkat dan kemudian dijadikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Karya Peter Donovan berjudul "Neutrality in Religious Study" telah direferensikan dalam publikasi "The Insider/Outsider Problem in The Study of Religion" edited oleh Russell T. McCutcheon.² Donovan adalah seorang penulis yang menulis tentang masalah bahasa keagamaan dalam studi agama. ia menulis buku berjudul "religious language" yang diterbitkan pada tahun 1976 oleh Sheldon Press. Buku ini membahas tentang masalah bahasa keagamaan dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam konteks keagamaan. Donovan mengkritik pendekatan permainan bahasa dalam studi bahasa keagamaan karena tidak mengakui bahwa agama beroperasi di dunia yang mengandung ide-ide lain dan bahwa banyak orang yang beragama membuat klaim kebenaran. Donovan menyarankan agar mengemukakan antara agama yang berbeda dan apologetika beberapa agama menunjukkan bahwa mereka saling berinteraksi satu sama lain dan dunia yang lebih luas sehingga tidak dapat dianggap sebagai permainan bahasa yang dilindungi. Selain ini, donovan juga menekankan bahwa bahasa keagamaan tidak selalu digunakan untuk membuat klaim kebenaran tetapi juga digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan keagamaan.

Beberapa buku yang ditulis oleh Donovan diantaranya yaitu "Basic English for Science"; "Religiuos Language (*issues in religious*)"; "Interpreting Religious Experience";

² Peter Donovan dalam "The Insider/Outsider Problem in The Study Of Religion" edited oleh Russell T. McCutcheon, 2005, h. 235.

“Delighting Customers How to Win and Retain Loyal Customers”; “Code Breaking in the Pacific”; “Imperfectly Proper”, dll.

Peter Donovan mengemukakan bahwa netralitas dan objektivitas adalah prinsip-prinsip utama penelitian ilmiah sosial yang harus dijunjung tinggi dalam studi agama. Donovan menjelaskan bahwa seorang peneliti harus mengedepankan netralitas dan objektivitas dalam rangka menghasilkan penelitian yang benar dan tidak memihak. Netralitas dalam studi agama dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Sementara itu, objektivitas dalam studi agama merujuk pada upaya untuk menghasilkan generalisasi yang benar dan akurat berdasarkan fakta yang ada, tanpa memihak pada satu sudut pandang atau keyakinan tertentu. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menghindari memberikan penjelasan yang tumpang tindih tentang objeknya dan tidak melakukan evaluasi. Seorang peneliti harus menjadi seorang yang tidak berhubungan apapun dengan objeknya, kecuali hanya sebatas peneliti yang sekedar untuk ilmu pengetahuan.

“Berpikiran terbuka”, “tidak terikat”, “objektif”, “tidak tertarik”, “tidak memihak”, “non-partisan”, dan “independen” adalah istilah-istilah yang biasanya digunakan ketika Studi Keagamaan berupaya menampilkan dirinya sebagai suatu disiplin akademis. Frasa seperti “agnostisisme metodologis”, “penanggungan penilaian”, dan “netralitas prosedural” juga ditemukan, dalam upaya merumuskan metodologi yang tepat.³ Istilah-istilah dan frasa-frasa tersebut jarang didefinisikan secara tepat, atau perbedaan di antara keduanya diteliti. Namun jika durenungkan sejenak akan terlihat bahwa hal tersebut masih jauh dari jelas atau tidak ambigu, dan bahwa jika hal tersebut ingin digunakan secara efektif dalam konteks ini, perlu dilakukan lebih banyak upaya melalui analisis dan klarifikasi awal.

Dalam tulisan ini Donovan memfokuskan pada salah satu gagasan yaitu netralitas. Ia berusaha memperjelasnya sebagai sebuah konsep, dan kemudian mempertimbangkan penerapan aktual atau kemungkinan penerapannya pada bidang studi agama. Donovan mendefinisikan netralitas, sebagai berikut:

“Bersikap netral berarti bersikap netral terhadap dua pihak atau lebih yang sedang bertikai, sedemikian rupa sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak terpengaruh secara material.”⁴

Ketika didefinisikan dengan cara seperti itu, netralitas dapat dilihat sebagai sebuah konsep relasional, yang mengandaikan adanya konteks tertentu. Ia tidak ada pada dirinya sendiri atau “secara luas”. Namun tentu saja, dapat diamati, masuk akal bagi seorang akademisi atau lembaga untuk mengumumkan kebijakan netralitas sebelum kasus-kasus aktual terjadi. Netralitas dalam bidang-bidang seperti studi agama dapat dilakukan dalam tiga cara yang dapat dibedakan *observer neutrality*, *participant neutrality*, dan *role neutrality*.⁵

1. Netralitas Pengamat

³ Peter Donovan, h. 235.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*,

Posisi ini tercermin dalam frasa seperti berdiri di garis samping, tetap menjadi pengamat, atau berada dalam posisi tidak terikat. Netralitas pengamat diasumsikan mewakili pendirian pihak yang tidak terlibat, yang hanya menggambarkan apa yang mereka lihat. Tidak ada penjelasan yang diberikan, tidak ada evaluasi yang dilakukan. Pengamat tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap situasi tersebut, hanya mencatat fakta secara akurat. Saat ini sudah diterima secara luas (khususnya dalam ilmu pengetahuan manusia) bahwa netralitas pengamat seperti itu dalam praktiknya tidak mungkin dilakukan, setidaknya karena alasan berikut.⁶

- A. Setiap penonton dibatasi oleh lokasi atau sudut pandangnya sendiri, dan oleh kerangka berpikirnya sendiri. Karena tidak mungkin menyatukan seluruh rincian situasi apa pun dalam pikiran seseorang, maka bisa dikatakan seorang pengamat pasti akan membuat pilihannya sendiri dan memaksakan struktur pemikirannya sendiri (bias pengamat).
- B. Seorang pengamat, yang tidak menyadari pentingnya hal-hal yang terjadi bagi para pihak itu sendiri, mungkin saja salah paham, betapapun hati-hatinya pencatatan pengamatannya (ketidapahaman pengamat).
- C. Kehadiran seorang pengamat, betapapun netralnya niatnya, dapat dengan sendirinya mengubah atau memutarbalikkan fakta, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi satu atau lebih pihak dan dengan demikian mengubah perilakunya (efek pengamat).

2. Netralitas Partisipan

Bentuk netralitas yang kedua, yakni netralitas partisipan, berupaya menghindari keterbatasan netralitas pengamat dengan lebih mempertimbangkan kompleksitas situasi aktual. Karena tidak ada pertanyaan tentang sepenuhnya menghindari keterlibatan, calon netral disini berupaya untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan partisipasinya sedemikian rupa untuk menghindari perubahan material apa pun terhadap keseimbangan kepentingan antara posisi-posisi yang bersangkutan. Partisipasi terkendali seperti ini bisa dikatakan secara informal sebagai “bertindak adil”, “menjadi segalanya bagi semua orang”, atau “berusaha untuk tidak terlalu mempengaruhi hasil”.

Sekali lagi, mencapai tujuan tersebut, jika memungkinkan, tidak akan bergantung pada niat atau upaya pihak yang ingin menjadi peserta netral, melainkan pada kepentingan para pihak dan sifat permasalahan di antara mereka. Apa yang tampak seperti ketidakberpihakan atau sikap adil dari sudut pandang para partisipan, belum tentu berdampak netral bagi para pihak itu sendiri, mengingat kekuatan, kebutuhan, dan kepentingan mereka yang relatif berbeda. Sebuah contoh praktis memperjelas hal ini:

Misalkan sejumlah organisasi keagamaan ada di kampus universitas. Satu atau lebih dari mereka mendatangi departemen Studi Keagamaan untuk meminta izin memasang poster di papan pengumuman departemen yang mengiklankan berbagai kegiatan mereka. Mengingat departemen ini mempunyai kebijakan netral dalam hal ini, apa tanggapan yang mungkin diambil?

- A. Departemen dapat memutuskan untuk tidak mengizinkan poster sama sekali kecuali semua organisasi diwakili. Hal ini mungkin dianggap sebagai bentuk sikap adil dalam menangani masalah ini. Apakah respons seperti itu akan mencapai netralitas? Itu

⁶ Peter Donovan, h. 236.

tergantung keinginan masing-masing pihak. Bagi sebagian orang, diperlakukan setara dengan kelompok lain akan memberi mereka pengakuan yang mereka cari. Mereka akan menganggap kepentingan mereka terlayani dengan baik oleh kebijakan tersebut. Namun bagi sebagian lainnya, diperlakukan hanya sebagai salah satu agama di antara banyak agama akan menjadi kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Mereka memilih untuk tidak memajang poster mereka sama sekali, sehingga (berdasarkan kebijakan ini) membuat orang lain kehilangan kesempatan untuk melakukannya.

- B. Departemen mungkin melihat keterbatasan dalam upaya apa pun untuk menawarkan hal yang setara perlakuan yang sama, dan mengadopsi kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama, dengan memberikan setiap kelompok kesempatan untuk memasang poster mereka jika mereka menginginkannya, atau untuk tidak melakukannya jika mereka menginginkannya. Apakah hal itu mencapai netralitas? Karena mengetahui, seperti yang seharusnya dilakukan oleh departemen tersebut, bahwa beberapa kelompok akan lebih tertarik dibandingkan kelompok lainnya untuk menerima tawaran tersebut, maka bukanlah suatu keputusan yang netral jika hanya memberikan kebebasan kepada kelompok-kelompok tersebut. Bagaimana dengan keberatan orang lain? Untuk mencapai netralitas dalam arti persamaan kesempatan, nampaknya diperlukan upaya untuk memastikan hasil yang tidak setara namun setara. Tapi siapa yang bisa memastikan, kesetaraan seperti itu mungkin saja terjadi pihak yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda?
- C. Misalkan departemen mengadakan pertemuan semua organisasi keagamaan, meminta mereka untuk menyepakati kebijakan yang mengatur penggunaan papan pengumuman. Sekali lagi, departemen mungkin dianggap mengetahui hal tersebut kelompok. Apakah penerapan “demokrasi” semacam itu merupakan jaminan netralitas, atau apakah ini hanya alat cuci tangan? Ada komplikasi lebih lanjut. Oleh siapa netralitas harus dinilai? Apakah tugas departemen hanya untuk memenuhi penilaiannya sendiri mengenai apa yang dianggap sebagai partisipasi yang seimbang? Apakah pihak-pihak yang berbeda pendapatlah yang harus mengambil keputusan? Atau justru masyarakat luas yang harus mengambil keputusan? Perpanjangan lebih lanjut dari contoh ini akan memperjelas hal ini.
- D. Misalkan departemen tersebut memajang poster satu agama secara eksklusif di papan pengumumannya, dan hal ini tidak hanya menyinggung organisasi keagamaan saingannya tetapi juga Perkumpulan Humanis universitas tersebut, yang mencurigai adanya pelanggaran terhadap sekularitas resmi universitas tersebut. Departemen tersebut mungkin berpendapat bahwa poster-poster tersebut dipajang hanya sebagai contoh ikonografi agama tertentu; tidak ada niat untuk mengiklankan atau mempromosikan satu agama dengan mengorbankan agama lain, atau bahkan untuk mempromosikan agama sama sekali. Pembeneran seperti itu sepertinya tidak akan bisa meyakinkan kaum Humanis atau kelompok agama lain. Karena mereka prihatin dengan persepsi masyarakat luas mengenai masalah ini, bukan hanya niat departemen tersebut. Departemen universitas, menurut mereka, harus terlihat netral.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa netralitas partisipan sangat sulit dicapai, bahkan dalam kasus-kasus yang cukup sederhana. Tidak ada kriteria keberhasilan yang jelas yang dapat dijabarkan sebelumnya. Seperti observasi yang murni netral, gagasan partisipasi netral tampaknya tidak cocok untuk diadopsi sebagai prinsip metodologis dalam Studi Keagamaan, setidaknya tanpa banyak upaya yang dilakukan untuk memberikan konten dan ketepatan.⁷

3. Netralitas Peran

Jika kita bertanya pada diri sendiri di mana contoh nyata netralitas dalam urusan manusia dapat ditemukan, ada beberapa contoh yang sering kita pikirkan; netralitas ketua panitia, misalnya hakim atau arbiter di pengadilan atau tribunal, atau netralitas wasit dalam pertandingan olahraga. Netralitas semacam ini saya sebut netralitas peran.⁸ Di sini kita menemukan apa yang tampaknya merupakan bentuk partisipasi khusus, dalam situasi di mana terdapat struktur peraturan dan prosedur. Dalam struktur tersebut, calon pihak netral mempunyai kontribusi dan peran yang pasti. Prosedur yang wajib mereka ikuti dalam memenuhi peran tersebut merupakan kriteria keberhasilan atau kegagalan mereka.

Netralitas peran tidak hanya sekedar kasus khusus dari netralitas secara umum, namun hal ini bisa menjadi kasus paradigma netralitas dalam urusan manusia. Di sinilah kita melihat apa arti netralitas dalam praktiknya, bagaimana hal itu menjadi mungkin, dengan kriteria apa netralitas itu dinilai, dan sebagainya. Upaya-upaya lain untuk mencapai netralitas menjadi semakin tidak jelas, semakin tidak dapat diambil keputusannya, dan semakin jauh upaya-upaya tersebut dihilangkan berasal dari paradigma peran netral. Dan mengenai "netralitas secara umum", sekarang kita dapat melihat mengapa nilai prinsip tersebut diragukan. Hal ini tidak memiliki perangkat persetujuan sebelumnya mengenai prosedur untuk mencapai hasil yang dapat diterima, dan indikasi mengenai apa yang dianggap telah mencapai hasil tersebut.

Dengan kasus netralitas peran seperti yang disebutkan, konsep netralitas tetap seperti pada definisi awal kami. Namun kriteria diberikan untuk keberhasilan penerapan konsep tersebut dalam kasus-kasus tertentu, melalui adanya aturan dan prosedur yang diterima, dan peran yang diakui dalam jenis situasi tertentu. Bisakah kita menggambarkan peran atau peran netral dari studi agama akademis dan praktisnya? Jika bisa, kita akan mendapatkan indikasi mengenai komitmen terhadap netralitas, dalam metodologi disiplin ini, yang sebenarnya bisa diartikan.

Dalam semua kasus netralitas peran, kita dapat mengidentifikasi serangkaian standar internal, kode etik, dan prosedur yang digunakan oleh mereka yang menjalankan peran tersebut untuk memantau dan menilai kinerja mereka sendiri. Bagi hakim ada aturan acara, pembuktian dan praktek pengadilan. Arbiter mempunyai teknik penyelesaian sengketa dan konsiliasi. Wasit mempunyai buku peraturan, tindakan disipliner, badan banding, dan sebagainya. Kode dan standar tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, mewakili kondisi yang diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Berdasarkan pemahaman tersebut maka keikutsertaan pihak netral dianggap netral oleh para pihak yang bertikai, yaitu tidak

⁷ Peter Donovan, h.238.

⁸ *Ibid.*

berdampak secara material terhadap kepentingan masing-masing pihak dalam proses yang sedang berjalan dan hasil akhirnya.

Penanggungan Keyakinan dan Ketidakpercayaan

Apa yang disebut dengan “pengurangan” isu-isu kebenaran dan validitas telah dianggap sebagai karakteristik khusus dari metodologi Studi Keagamaan modern, jika dibandingkan dengan diskusi-diskusi agama yang bersifat konfesional dan teologis di satu sisi, serta penjelasan-penjelasan dan penafsiran naturalistik mengenai hal tersebut. di sisi lain. Dampak dari strategi ini adalah mengalihkan perhatian dari hal-hal yang kontroversial atau meragukan, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang terbuka untuk diselidiki melalui prosedur yang disepakati khususnya, deskripsi yang cermat dan sensitif mengenai pokok bahasan itu sendiri.

Seperti halnya netralitas, gagasan untuk menanggungan keyakinan dan ketidakpercayaan memerlukan lebih banyak klarifikasi awal daripada yang telah diterima sebelumnya, jika hal tersebut ingin memainkan peran mendasar dalam metodologi Studi Keagamaan. Terkait dengan netralitas, manfaat dari “pengurangan” tersebut perlu dibuktikan dalam kasus-kasus nyata. Sekadar pernyataan bahwa seseorang menanggungan kepercayaan dan ketidakpercayaan secara umum masih jauh dari cukup untuk memastikan bahwa diskusi selanjutnya tidak akan terpengaruh oleh pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dikesampingkan. Hal-hal tidak mudah dipisahkan dari jaringan konseptualnya, dan hanya dalam keadaan nyata kriteria akan muncul untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam usaha tersebut.

Yang terpenting untuk tujuan adalah penggunaan pragmatis dari prosedur “bracketing”, bukan membenaran teoretisnya. Dalam praktik Ilmu Keagamaan, kita menemukan bahwa penilaian terhadap isu-isu tertentu biasanya ditanggungan, sehingga hal-hal yang lebih disepakati dapat dilakukan tanpa mengurangi kepentingan berbagai pihak. Diakui bahwa agama, apa pun yang terlibat di dalamnya, memang memiliki komponen duniawi yang substansial, sehingga mengundang kajian ilmiah dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dikatakan Joseph Kitagawa, dalam kata pengantarnya di Ensiklopedia:

“Kita berasumsi bahwa tidak ada fenomena yang murni bersifat keagamaan. Fenomena keagamaan adalah fenomena kemanusiaan sehingga tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial, budaya, psikologis, biologis, dan sebagainya.”⁹

Mengingat bahwa para pihak siap untuk melihat permasalahan dalam bidang agama yang disengketakan sebagai hal yang terbuka untuk diselidiki sesuai dengan prosedur normal ilmu-ilmu humaniora dan sosial, maka terdapat posisi netral dalam hal ini sesuai dengan prosedur tersebut jelas menjadi mungkin bagi pembelajaran agama.

Netralitas Profesional dan Bias Pribadi

⁹ Peter Donovan, h. 243.

Meskipun studi agama, idealnya, merupakan suatu kegiatan ilmiah semata, orang-orang yang terlibat di dalamnya bukan hanya para sarjana. Mereka adalah anggota ras, komunitas dan keluarga. Mereka menikah, mendidik anak-anak mereka, menguburkan orang mati; mereka menghadiri atau menjauhi tempat ibadah, merayakan atau mengabaikan hari raya, mendukung atau menentang tujuan, bergaul dengan orang lain atau menyendiri. Dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari, para sarjana profesional mau tidak mau harus menyesuaikan diri, dengan satu atau lain cara, dalam kaitannya dengan isu-isu dan institusi keagamaan. Bagaimana netralitas profesional dapat menghindari dampak bias pribadi?

Dalam *Netralitas dan Komitmen*, Basil Mitchell melihat hal ini sebagai kasus khusus dari masalah yang dihadapi oleh akademisi mana pun yang "harus menyesuaikan tuntutan kehati-hatian dan ketidakterikatan ilmiah dengan kebutuhan untuk mengembangkan dan mempertahankan 'filsafat hidup' yang konsisten." Namun, hal ini terletak pada kurangnya prinsip-prinsip rasional, di seluruh disiplin ilmu ini, untuk mengevaluasi pengaruh "bias pribadi" terhadap kinerja ilmiah.

Mungkin ada anggapan bahwa selama para sarjana siap untuk "menyatakan kepentingan mereka", maka netralitas dapat terjamin, karena pihak lain hanya perlu memberikan kelonggaran yang pantas dalam menilai manfaat dari pandangan mereka. Oleh karena itu, F. C. Happold, dalam bukunya tentang *Mistisisme*, menulis, "Jika seseorang dengan tulus memercayai sesuatu, maka tidak mungkin bersikap obyektif secara dingin. Juga tidak perlu demikian, asalkan bias apa pun diakui secara jujur."¹⁰

Tapi itu membuatnya terdengar terlalu mudah. Kesulitannya terletak pada menentukan "bias" apa yang sebenarnya terjadi dalam memegang posisi tertentu sehubungan dengan keyakinan agama. Jelasnya, pengetahuan umum bukanlah panduan dalam hal ini. Bahkan jika sudah menjadi rahasia umum bagaimana, katakanlah, umat Katolik, Muslim, atau Humanis pada umumnya cenderung berprasangka buruk sehubungan dengan masalah agama, umat Katolik, Muslim, atau Humanis yang terlibat dalam studi akademis tentang agama mungkin akan jauh dari tipikal.

Kekeliruan penafsiran yang disengaja atau ketidakadilan yang terang-terangan tentu saja merupakan hal yang wajar. Bias yang terang-terangan seperti itu jelas tidak pantas dalam Studi Keagamaan modern sehingga harus dihindari demi kepentingan akademis jika bukan karena motif yang lebih tinggi. Bias yang tidak disadari lebih bermasalah; kecurigaan itu Pola pikir dan kepekaan para sarjana akan sangat dibentuk oleh keterikatan atau kebencian pribadi mereka terhadap agama sehingga kategori-kategori yang mereka gunakan dalam berhubungan dengan posisi-posisi lain pasti akan mendistorsi mereka.

Dengan tidak adanya kriteria rasional untuk mengevaluasi kecurigaan dan dugaan semacam itu, hanya ada satu cara agar penilaian terhadap permasalahan ini dapat terhindar dari sikap yang terlalu sederhana dan sewenang-wenang. Artinya netralitas harus diperlakukan sebagai kepatuhan terhadap peran yang ditentukan; sebagai kemampuan untuk mematuhi standar profesionalisme, bukan sekadar kepemilikan niat atau kerangka berpikir tertentu. Barangkali bukti terkuat dari keberhasilan studi akademis mengenai agama pada sikap netralitas peran adalah ketika agama berhasil merangkul, sesuai dengan standar

¹⁰ *Ibid.*

profesionalisme yang disepakati, keragaman keyakinan dan praktik pribadi seluas-luasnya di antara para penganutnya.

Mengapa Netral?

Hingga saat ini diskusi telah mengasumsikan tanpa keraguan bahwa netralitas, dalam arti tertentu, bukan hanya merupakan suatu kebajikan ilmiah tetapi juga merupakan prasyarat metodologis untuk suatu disiplin ilmu seperti Studi Keagamaan. Namun kini kita mungkin mulai bertanya-tanya apakah netralitas memang bisa dilakukan terlalu jauh. Haruskah disiplin universitas mengikatkan diri pada sebuah prinsip yang tampaknya membebaskannya dari tanggung jawab akademis yang normal untuk membuang hipotesis yang gagal dan mengabaikan keilmuan yang kurang bereputasi? Kebijakan keterbukaan pikiran yang bersifat permanen dan wajib mungkin tampak seperti bentuk obskurantisme yang disengaja, (sebuah strategi yang mungkin untuk melindungi anggapan teologis yang tersembunyi).

Namun, sulit untuk meringkai dilema tersebut tanpa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Misalkan dapat ditunjukkan bahwa strategi netralisasi *epoche* atau *bracketing* digunakan untuk menjaga pilihan tetap terbuka (seperti hakim yang menolak untuk memberikan putusan). Dengan demikian, netralitas mungkin akan dianggap terlalu jauh. Namun jika perselisihan yang dipermasalahkan adalah mengenai metode dalam memutuskan permasalahan tersebut (apa saja pilihan yang ada, apakah pilihan tersebut masuk akal, mana yang paling didukung oleh bukti, dan sebagainya) maka keputusan sebelumnya untuk membatasi netralitas akan terlihat terlalu dini.

Sekali lagi, kami menemukan bahwa upaya untuk berteori tentang netralitas secara umum menciptakan perdebatan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak memiliki kriteria, seperti halnya pencapaian netralitas sebaiknya dinilai dalam kaitannya dengan situasi tertentu, sehingga kegunaan atau keinginan netralitas sebaiknya dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan atau sasaran tertentu.

Netralitas jarang sekali menjadi tujuan akhir. Mengingat beragamnya maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Studi Keagamaan, ada banyak alasan mengapa netralitas layak untuk diupayakan. Ini membantu membebaskan subjek dari kekhawatiran atau tekanan faksional. Hal ini memastikan jangkauan data relevan seluas mungkin, memungkinkan perbandingan dan generalisasi di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan peninjauan kembali posisi-posisi yang sudah ada, penerapan sudut pandang baru, penyelidikan topik-topik yang diabaikan atau ditekankan.

Pada platform netralitas, Studi Keagamaan dapat membantu menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang bersaing untuk bertemu dan menemukan titik temu. Jika diterima oleh komunitas akademis dan agama sebagai “perantara yang jujur”, maka hal ini dapat memainkan peran yang berharga dalam mendorong kolaborasi ilmiah dan penelitian. Ia dapat mengumpulkan sumber informasi terakreditasi, menyusun terminologi yang dapat diterima, definisi ukuran standar dan topologi. Jika lembaga-lembaga politik atau media massa memberikan kepercayaan terhadap hal ini, maka hal ini mungkin dapat memajukan perjuangan hak asasi manusia, dengan membela pihak-pihak yang disalahpahami atau kurang terwakili. Hal ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat pendidikan dan memajukan pemahaman multi-budaya dalam masyarakat majemuk.

Namun daftar singkat mengenai kemungkinan tujuan Studi Keagamaan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada spesifikasi menyeluruh mengenai suatu bentuk netralitas metodologis yang bisa digunakan. Sekali lagi, itu tergantung pada keadaan. Apa yang oleh sebagian pihak mungkin dianggap sebagai aktivitas ilmiah yang sah akan dianggap oleh pihak lain sebagai serangan terhadap tradisi mereka. Bagi sebagian orang, apa yang terlihat seperti promosi hak asasi manusia akan dianggap oleh sebagian orang sebagai hasutan untuk melakukan subversi. Apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai prinsip ilmiah yang ketat akan dianggap oleh sebagian orang sebagai positivisme yang dangkal. Variasinya tidak terbatas.

Netralitas tidak bisa dipaksakan. Hal ini juga tidak dapat dicapai, dalam studi agama atau di tempat lain, kecuali keadaannya memungkinkan. Donovan berpendapat bahwa hal tersebut kemungkinan besar terjadi ketika terdapat praktik dan prosedur yang disepakati, peran yang diterima, atau sesuatu yang mendekati hal tersebut. Selain itu, setiap deklarasi sepihak oleh Studi Keagamaan yang berkomitmen pada posisi yang disebut “netralitas prosedural”, paling banter, hanyalah sebuah permulaan.¹¹

Definisi netralitas dalam studi agama menurut Peter Donovan menekankan pentingnya menjaga cara pandang yang terbuka, tidak terikat, obyektif, tidak tertarik, tidak memihak, non-partisan, dan independen ketika mempelajari agama. Ia berpendapat bahwa netralitas diperlukan agar para sarjana dapat memahami dan menghargai keragaman tradisi agama dan menghindari pemaksaan keyakinan atau nilai-nilai mereka sendiri pada subjek kajiannya. Donovan juga mencatat bahwa netralitas tidak berarti bahwa para akademisi harus menghindari penilaian atau evaluasi, namun mereka harus melakukannya dengan cara yang adil dan tidak memihak, berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan.

Definisi netralitas lainnya dalam studi agama mungkin berbeda dalam penekanannya pada aspek netralitas tertentu. Misalnya, beberapa pakar mungkin lebih berfokus pada perlunya para pakar untuk menyanggah keyakinan dan nilai-nilai mereka ketika mempelajari agama, sementara pakar lainnya mungkin menekankan pentingnya menghindari bias atau prasangka. Selain itu, beberapa definisi mungkin mempertimbangkan peran norma dan praktik disipliner dalam membentuk studi agama, dan mungkin berpendapat bahwa netralitas harus dipahami dalam kaitannya dengan norma dan praktik tersebut. Secara keseluruhan, meskipun mungkin ada perbedaan dalam penekanan dan pendekatan, sebagian besar definisi netralitas dalam studi agama memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan pendekatan yang berpikiran terbuka, tidak memihak, dan adil dalam studi agama.

Netralitas dalam studi agama dari Peter Donovan telah mempengaruhi bidang studi agama dengan berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang metodologi yang tepat untuk mempelajari agama. Karyanya telah dikutip dan didiskusikan oleh para sarjana lain di bidangnya, dan gagasannya tentang kegunaan metafora peran atau suara dalam memikirkan netralitas dalam studi agama telah digunakan oleh beberapa sarjana. Penekanan Donovan pada pentingnya mempertahankan perspektif yang terbuka, tidak terikat, obyektif, tidak memihak, tidak memihak, non-partisan, dan independen ketika mempelajari agama telah membantu membentuk cara para sarjana mendekati studi agama. Secara keseluruhan, karya Donovan

¹¹ Peter Donovan, h. 247.

telah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran netralitas dalam studi agama dan telah membantu memajukan bidang ini dengan cara yang penting.

PENUTUP

Peter Donovan mengartikan netralitas dalam kajian agama sebagai upaya mempertahankan cara pandang yang terbuka, tidak terikat, obyektif, tidak memihak, tidak memihak, non-partisan, dan independen dalam mempelajari agama. Dalam artikelnya "Netralitas dalam Studi Keagamaan," Donovan mengajukan definisi netralitas sebagai berikut: "Bersikap netral berarti bebas dari bias, prasangka, atau keberpihakan; tidak memihak, tidak memihak, dan obyektif; berpikiran terbuka dan independen dalam pemikiran dan penilaian seseorang." Donovan menekankan bahwa netralitas merupakan prinsip penting dalam studi agama, karena memungkinkan para sarjana untuk mendekati studi agama dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka atau bias. Ia berpendapat bahwa netralitas diperlukan agar para sarjana dapat memahami dan menghargai keragaman tradisi agama dan menghindari pemaksaan keyakinan atau nilai-nilai mereka sendiri pada subjek kajiannya. Donovan juga mencatat bahwa netralitas tidak berarti bahwa para akademisi harus menghindari penilaian atau evaluasi, namun mereka harus melakukannya dengan cara yang adil dan tidak memihak, berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Donovan, Peter. "Neutrality in Religious Studies", *Religious Studies*, vol. 26, no. 1, Maret, 1990, 103-115.
- Hamsah, Ustadhi "signifikansi analisis elenktik bagi metode studi agama di perguruan tinggi agama islam (PTAI)", *Esensia* vol 17, no 2, 2016, 175-192
- McCutcheon, Russell T. *The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion*, 2005, 235-247.